



LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2008



DITERBITKAN : DESEMBER 2008
OKTOBER 2007 - OKTOBER 2008



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
PROPINSI JAWA TIMUR





**BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PAMEKASAN**

ALAMAT : JL. JOKOTOLE NO. 143 PAMEKASAN

TELP. : (0324) 322504

FAX. : (0324) 322828

E – MAIL : blh. Pamekasan @ telkom. Net

WEB : www. Pamekasan . Info



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang menggambarkan keadaan lingkungan hidup secara transparan, penyebab dan dampak permasalahannya, serta respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebar luaskan kepada masyarakat. Untuk itu pelaporan lingkungan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kualitas dan alat untuk menjamin perlindungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan sarana yang penting mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup.

Kabupaten Pamekasan adalah bagian dari Pengelolaan lingkungan hidup wilayah regional Jawa, kedepan akan mengalami perubahan yang sangat besar akibat selesainya pembangunan Jembatan Suramadu, industrinisasi Madura serta akibat lainnya akan berdampak besar terhadap perubahan di wilayah Kabupaten Pamekasan khususnya.

Dengan ada dampak akibat perubahan tersebut diperlukan data awal untuk mengkaji kondisi yang ada serta keinginan kedepan bagaimana bentuk kondisi pengelolaan lingkungan yang akan datang.

Sangat penting dan strategis penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2008 merupakan awal kegiatan dalam mendata kondisi riil lingkungan hidup pada Kabupaten Pamekasan sebagai era mempersiapkan kondisi pasca pembangunan Jembatan Suramadu serta pembangunan Madura secara umum.

Demikian Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2008 Kabupaten Pamekasan disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat .

*KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PAMEKASAN
SELAKU KETUA TIM PENYUSUN*

A.MINOL MULJADI , S.Sos, M.Si
*Pembina
NIP. 010 103 727*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar tabel

Daftar gambar

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

- ***Tujuan penulisan Laporan***
- ***Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan***
- ***Gambaran umum***
- ***Kondisi geografis, geologi, tataruang, kependudukan dan kesehatan masyarakat***
- ***Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomidan budaya didaerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan***

BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

BAB III AIR

BAB IV UDARA

BAB V LAHAN DAN HUTAN

BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI

BAB VII PESISIR DAN LAUT

BAB VIII REKOMENDASI/TINDAK LANJUT

- DAFTAR PUSTAKA**
- ***Sumber data***
 - ***Referensi pustaka***

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	SUMBER	TAHUN
1.1	PEMANTAUAN KUALITAS AIR	BTKL	2008
1.2	PEMANTAUAN AIR TANAH	BTKL	2008
1.3	VOLUME AIR/WADUK/SITU	PENGAIRAN	2008
1.4.	DAFTAR SUMUR PANTAU	BLH	2008
1.5	JUMLAH CURAH HUJAN	-	-
1.6.a.	SUMBER AIR BAKU DANPRODUKSI AIR BERSIH PDAM	PDAM	2007
1.6.b.	DISTRIBUSI AIR BERSIH MENURUT JENIS PELANGGAN	PDAM	2007
1.6.c.	PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN JENIS KEGIATAN	PDAM	2007
1.7.a.	BANYAKNYA PUPUK DAN PESTISIDA YANG DIGUNAKAN DI KOLAM	-	-
1.7.b.	BANYAKNYA PUPUK DAN PESTISIDA YANG DIGUNAKAN DI TAMBAK	-	-
1.7.c	BANYAKNYA PUPUK DAN PESTISIDA YANG DIGUNAKAN DI SAWAH	-	-
1.8.	HASIL ANALISA KUALITAS LIMBAH CAIR (INDUSTRI)	-	-
1.9.	HASIL ANALISA KUALITAS LIMBAH CAIR (RUMAH SAKIT)	-	-
	HASIL ANALISA KUALITAS LIMBAH	-	-

1.10.	CAIR (HOTEL)		
	BANYAKNYA RUMAH TANGGA	-	-
1.11.a.	DENGAN SEPTIC TANK		
	BANYAKNYA RUMAH TANGGA	BLH	2007
1.11.b	TANPA SEPTIC TANK		
	KUALITAS UDARA AMBIEN	BLH	2007
2.1.	KUALITAS AIR HUJAN		
2.2.	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR	-	-
2.3.	DAN BAHAN BAKAR YANG DIGUNAKAN		
	KONDISI IKLIM	-	-
2.4.	PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI	DISHUB	2008
2.5.a.	BESI DAN BAJA		
	PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI	BMG	2008
2.5.b.	PULP DAN KERTAS		
	PEMANTAUAN EMISI	-	-
2.5.c.	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP		
	PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI	-	-
2.5.d.	SEMEN		
	PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI	-	-
2.5.e.	BUKAN LOGAM		
	PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI	-	-
2.5.f	LOGAM		
	LUAS HUTAN MENURUT FUNGSI /	-	-
3.1.	STATUS		
	LUAS PENGUSAHAAN HUTAN	-	-
3.2.	TANAMAN INDUSTRI		
	KONVERSI HUTAN	PERHUTANI	2007
3.3.	LUAS KERUSAKAN HUTAN		
	BERDASARKAN PENYEBABNYA	PERHUTANI	2007



3.4.	LUAS DAN PERKIRAAN PRODUKSI	PERHUTANI	2007
3.5.	PERTAMBANGAN GOLONGAN C	PERHUTANI	2007
3.6.	LUAS LAHAN KRITIS	BAG. PER EKONOMIAN	2007
3.7.	RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN REBOISASI	BLH	2007
3.8.	RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGHIJAUAN	DISHUTBUN	2007
4.1.	FLORA YANG DILINDUNGI/LANGKA	DISHUTBUN	2007
4.2.	FAUNA YANG DILINDUNGI/LANGKA	DISHUTBUN	2008
5.1.	PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT	DISHUTBUN	2008
5.2.a.	LUAS TUTUPAN TERUMBU KARANG	-	-
5.2.b.	PERSENTASE KERUSAKAN PADANG LAMUN	DPK	2008
5.2.c.	TUTUPAN DAN KERAPATAN MANGROVE	DPK	2008
5.3.	KEPENDUDUKAN DI LAUT DAN PESISIR	DISHUTBUN	2008
5.4.	BUDI DAYA LAUT DAN PESISIR	DPK	2008
5.5.	PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN WISATA BAHARI	DPK	2008
5.6.	ABRASI DAN REKLAMASI	BLH	2008
5.7.	HASIL ANALISA KUALITAS LIMBAH CAIR HOTEL DI KAWASAN WISATA BAHARI	-	-
5.8.	JUMLAH HOTEL/PENGINAPAN DI KAWASAN WISATA BAHARI	-	-





6.1.	BANYAKNYA PENDERITA PENYAKIT	-	2007
7.1.	DAFTAR INDUSTRI PENGHASIL LIMBAH B3	-	-
7.2.	PENGELOLAAN SAMPAH	DINKES	2008
8.1.	PRODUK HUKUM TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-
8.2.	ANGGARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BLH	2008
8.3.	JUMLAH PERSONIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	BLH	2008





DAFTAR GAMBAR

NO	JENIS GAMBAR	HALAMAN	KET.
1	Peta Kabupaten		
2	Peta Wilayah Kecamatan		
3	Hutan Mangrove		
4	Pembibitan Mangrove		
5	Penanaman Mangrove		
6	Peta Aliran Sungai Kota		
7	Taman Kota Arek Lancor		
8	Hutan Kota Tirta Basuki		
9	Grafik Luas Lahan Kritis		



ABSTRAK

Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**good environmental governance**) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup. Sejak tahun 2002 pada tingkat nasional telah diterbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun. Sementara untuk pemerintah daerah sejak tahun 1982 telah dikembangkan Neraca Lingkungan Hidup (NLH), kemudian pada tahun 1986 menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), dan mulai tahun 1994 menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Sejak tahun 2001 secara bertahap laporan NKLD diintegrasikan kedalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota dengan mulai menggunakan format State – Pressure – Respons (**S – P – R**) dalam penyusunannya. Pada tahun 2002 telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Daerah untuk menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh KNLH.

Selanjutnya untuk tahun – tahun kedepan sudah merupakan keharusan untuk Daerah Kabupaten / Kota menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan sudah menjadi agenda yang tetap dalam Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.



BAB .I

PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan penulisan Laporan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah bertujuan :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

1.2. Visi dan Misi Kabupaten

“ Terwujudnya Masyarakat Pamekasan yang Makin Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Dengan Bertumpu Pada Pengembangan Potensi Lokal, Serta Berdasarkan Pada Nilai –nilai Agama ”

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan beberapa misi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan/syariat agama bagi pemeluknya.

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan daya beli, masyarakat Kabupaten Pamekasan dan mengurangi dampak tekanan kemiskinan.
3. Pengembangan infrastruktur, potensi lokal, pemberdayaan, kemandirian, dan kualitas SDM masyarakat guna mendukung pengembangan ekonomi rakyat.
4. Menciptakan iklim keamanan yang kondusif dan penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
5. Menggali potensi dan kekayaan sumber daya alam, serta meningkatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dengan mengutamakan kualitas pelayanan masyarakat, profesionalisme, yang bebas dari KKN.

1.3. Gambaran umum

- 1.3.1. Kondisi geografis, geologi, tataruang, kependudukan dan kesehatan masyarakat.

A. Letak Geografi

Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu Kabupaten di kawasan Pulau Madura memiliki luas wilayah 792,30 Km². Secara astronomi berada pada 6° 51' sampai dengan 7° 31' Lintang Selatan dan 113° 19' sampai dengan 113° 58' Bujur Timur.



Secara garis besar wilayah kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian Selatan dan dataran tinggi di wilayah Tengan dan Utara. Kecamatan Pakong merupakan merupakan dataran tertinggi dengan ketinggian 380 m diatas permukaan laut.

Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Batumarmar terluas (9.707 Ha) atau sekitar 12,25% dari seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Pamekasan sebagai Ibukota Kabupaten justru memiliki luas terkescil (2.647 Ha) atau hanya sekitar 3,34% dari seluruh wilayah.

B. Struktur Penggunaan Lahan

Kabupaten Pamekasan memiliki Luas Wilayah 792,30 Km² yang terdiri dari :

1. Permukiman	: 102,45 Km ²
2. Persawahan	: 124,65 Km ²
3. Tegall	: 518,83 Km ²
4. Hutan	: 8,26 Km ²
5. Tambak/Kolam	: 26,94 Km ²
6. Tanah Tandus/rusak/Tambang	: - Km ²
7. Lain-lain	: 11,17 Km ²

C. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pamekasan

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Sampang

D. Struktur Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan

1. Kecamatan	: 13
2. Perwakilan Kecamatan	: -
3. Desa	: 178
4. Kelurahan	: 11
5. Rukun Warga (RW)	: 1.021
6. Rukun Tetangga (RT)	: 2.554

E. Struktur Kependudukan

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan dalam tahun terakhir sebanyak :

URAIAN	SATUAN	2007	2008
Jumlah Penduduk	Jiwa	695.505	704.683
- Laki-laki	Jiwa	338.203	341.262
- Perempuan	Jiwa	357.302	363.421
- Kepadatan Penduduk	Jw/Km ²	878	889

F. Sektor- sektor yang menonjol dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2008 di Kabupaten Pamekasan.

1. Sektor Pertanian dan Kehutanan

A. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan.

Secara umum sektor Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian masyarakat, bila dilihat dari angka PDRB tahun 2008 atas dasar Harga Berlaku diketahui bahwa sumbangan Sub Sektor pertanian Tanaman Pangan untuk bahan makanan mencapai 28,58% atau Rp. 451.797,39 (dalam juta rupiah).

Produksi buah-buahan seperti Durian termasuk produk unggulan daerah pada sub sektor pertanian tanaman pangan :

- Produksi durian yang dikenal di Kecamatan Pegantenan merupakan durian yang sudah produktif (masak). Produksi buah durian yang dikenal adalah duria kasar yang memiliki cirri-ciri daging buah yang tebal, berwarna kuning keemasan, pulen dan sangat manis, sedangkan biji buahnya kecil atau gepeng. Disamping itu jenis durian lain yang dikembangkan adalah durian petruk dan jenis Bangkok. Setiap petani rata-rata memilikipohon durian yang sudah produktif antara 5 – 10 pohon. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan kedepan adalah sektor pertanian pengembangan buah bentul di Kecamatan Palenga'an dan sekitarnya.

B. Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Tanaman perkebunan di Kabupaten Pamekasan yang memiliki nilai produksi cukup besar yaitu tanaman tembakau karena menghasilkan jenis tembakau yang berkualitas baik. Dengan produksi tahun 2007 sebesar 19.869 ton dengan luas 33.462 Ha.

C. Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan terdiri dari Hutan Lindung sebesar 2.339 ha, Hutan Produksi 276,8 ha dan Hutan Kota sekitar 25 ha dan hutan rakyat seluas 7.779 ha. Sedangkan untuk kawasan hutan seluas 285,80 ha dan kawasan non hutan seluas 785,15 ha yang tersebar di empat Kecamatan diantaranya Kecamatan Galis, Larangan, Pademawu dan Tlanakan. Kawasan hutan dan kawasan non hutan tersebut adalah hutan mangrove jenis tinjangan yang diantaranya adalah hutan mangrove yang ada di Desa Branta Tinggi yang merupakan hasil swadaya masyarakat sejak tahun 1980. Luasan hutan ini mengalami peningkatan disebabkan adanya usaha reboisasi sebesar 23,88 % pada tahun 2006 dan 2007 (lihat tabel 2.8) yang mengantarkan Pamekasan mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap hutan.



(*Hutan Mangrove*)

Perlu diketahui bahwa sesuai data yang diambil dari Perum Perhutani luas hutan sebesar 756,2 ha ada penggunaan lahan hutan sebagai lahan pertanian oleh penduduk sekitar hutan sebesar 299,50 ha yang mengakibatkan luas hutan secara keseluruhan berkurang sebesar 39,60 % (data Perum Perhutani

2003). Jadi memerlukan usaha pemulihan terhadap pengurangan hutan tersebut dengan adanya pembibitan dan penanaman.



(Pembibitan Mangrove)



(Penanaman Mangrove di Desa Pegagan)

TABEL 2.8. LUAS HUTAN MENURUT FUNGSI/STATUS

Kabupaten/Kota : Pamekasan
Tahun Data : 2008

NO	Hutan	Luas (Ha)	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1	2	3	4
A	Kawasan Konservasi		
1	Cagar Alam	-	-
2	Suaka Margasatwa	-	-
3	Taman Wisata	-	-
4	Taman Buru	-	-
5	Taman Nasional	-	-
6	Taman Hutan Rakyat	1739	2339
B	Hutan Lindung	276,8	276,8
C	Hutan Produksi	471,2	471,2
D	Hutan Kota	25	25
	Total Luas Hutan	2512	3112

Sumber : Dishutbun Kabupaten Pamekasan

Sedangkan yang dikuasai oleh Perum Perhutani Madura seluas 746,6 ha tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan. Untuk luas kawasan sengketa yang ditanami oleh masyarakat sebesar 299,5 ha.

2. Sektor Industri (Sub Sektor Industri Kecil dan Menengah)

Usaha kerajinan batik di Pamekasan merupakan usaha kerajinan yang bisa diandalkan. Sampai saat ini ada ± 900 unit usaha pengrajin batik tradisional baik menengah maupun kecil. Ciri khas dari batik Pamekasan selain motifnya yang unik juga proses pembuatannya di titik beratkan pada kualitas produk yang dihasilkan (tidak mudah luntur/pudar lukisannya). Setiap jenis pekerjaan dari keseluruhan proses membuat batik tulis ini dikerjakan oleh tenaga yang sudah berpengalaman. Usaha kerajinan batik tradisional ini didukung oleh tenaga-tenaga terampil dan berpengalaman. Pemasaran dari hasil produksi batik ini bisa menjangkau pasar local, Nasional bahkan Internasional.

Sesuai dengan data yang telah diambil tahun 2006 sampai 2007 terdapat limbah dari industri tahu tempe sebesar 15.472 m³, industri kecil pengeringan kulit sebesar 1.126 m³, industri kecil batik tulis sebesar 1.930 m³ dengan jumlah limbah keseluruhan 25.734 m³ yang sangat berpotensi dalam mencemari badan air sungai di Kabupaten Pamekasan. Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengalokasikan dana membuat kegiatan untuk mengelola limbah tahu dan tempe sebesar Rp. 92.000.000,- (pembangunan IPAL tahu tempe sebanyak 6 unit) usaha tersebut masih terlalu kecil namun sudah merupakan respon dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menanggulangi kasus pencemaran yang semakin meningkat.

3. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi (Sub Sektor Pariwisata)

Di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan :

- Wisata Alam yaitu Api Tak Kunjung Padam (Api Abadi)
Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan di Pedukuhan Dangkah yang merupakan obyek wisata ± 5 Km arah selatan dari kota. Menurut penyelidikan para ahli, api alam ini mengandung minyak dan gas belerang serta terdapat sumber air belerang. Dari catatan jumlah pengunjung (wisatawan mancanegara) rata-rata 35 orang/bulan. Sedangkan wisatawan nusantara 150 orang/bulan.
- Pantai Jumiang yang merupakan wisata bahari di Kabupaten Pamekasan.
- Pemandian Tirta Basuki Desa Sentol Kecamatan Pademawu.
- Wisata Keagamaan yaitu Ziarah Pasarean Batu Ampar dan Vihara.
- Wisata Budaya yaitu Karapan Sapi
Karapan sapi termasuk jenis wisata budaya yang merupakan andalan dan menjadi khas kesenian Madura. Acara ini

digelar 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh sekitar 10.000 penonton local termasuk juga pengunjung dari wisatawan mancanegara. Sedangkan sarana penunjang seperti hotel sebanyak 9 hotel melati/losmen dengan jumlah kamar 203 buah kamar.

Sebagai penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan sudah terdapat 12 hotel dan lainnya sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 3.3. JUMLAH HOTEL & PARIWISATA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Kota / Kabupaten : Pamekasan

Tahun Data : 2008

NO	KECAMATAN	HOTEL						PARIWISATA	PASAR MODERN	PASAR TRADISIONAL
		Melati	Bintang							
			1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tlanakan	-	-	-	-	-	-	1	-	?
2	Pademawu	1	-	-	-	-	-	2	-	?
3	Galis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Larangan	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5	Pamekasan	11	-	-	-	-	-	-	3	3
6	Proppo	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Palengaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Pegantenan	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Kadur	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Pakong	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Batu Marmar	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Pasean	-	-	-	-	-	-	-	-	?
	JUMLAH	12	-	-	0	-	-	5	3	13

Sumber Data : Bagian Perekonomian Setwilda Kabupaten Pamekasan.

Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Pendanaan / biaya pembangunan bidang lingkungan untuk Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun banyak mengalami peningkatan. Untuk tahun 2007 sebesar Rp.1.646.994.000,- sedangkan untuk tahun 2008 sebesar Rp.2.219.190.000,- namun secara kualitatif biaya rutin ditambah dengan biaya pembangunan masih di bawah 1 % dari anggaran APBD keseluruhan (lihat tabel). Untuk mencapai pengelolaan kota yang ideal

dalam penyediaan anggaran sebesar 5 % dari total APBD kota / Kabupaten.

**TABEL ANGGARAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN / KOTA**

No	Sumber Dana	ANGGARAN TAHUN		
		2006	2007	2008
1	Total APBD (Juta)	312.251.250.912	482.752.567.634	599.667.248.660
	Anggaran Bidang Lingkungan Hidup (Juta)			
2	a. APBN			
	- DAK	-	336.000.000	735.000.000
	- DAU			
	- BLN			
	b. APBD (Juta)	2.956.170.357	5.431.917.158	6.231.675.052
3	Prosentase dana Lingkungan Hidup dengan total APBD (%)	1	1	1

Adapun kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Kebijakan pendanaan lingkungan diarahkan untuk penyusunan perencanaan program pengelola dan penanggulangan kebersihan, pertamanan dan keindahan serta pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan pelayanan persampahan, pengerukan dan pembersihan drainase kota dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan keindahan serta pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan pengembangan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta memberikan pertimbangan teknis untuk menerbitkan perijinan yang berkaitan dengan perubahan ekosistem dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;serta pencegahan terhadap kerusakan, pencemaran lingkungan.



4. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan dan masyarakat dengan mengikut sertakan unsur pengelola dan masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan





BAB .II

ISU LINGKUNGAN

HIDUP UTAMA



II. ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Sesuai dengan petunjuk penyusunan SLHD Tahun 2008 diambil untuk mengangkat isu lingkungan hidup mempergunakan metode S-P-R (States – Pressure – Response) sehingga dengan demikian di Kabupaten Pamekasan telah tersusun isu lingkungan hidup sebagai berikut :

NO.	ISU	STATE (S)	PRESSURE (P)	RESPONSE (R)	REKOMENDASI
1.	Menurunnya / Matinya debit mata air.	Data tahun 2007 sumber air 76 titik hidup 43 titik, mengecil 23 titik, mati 10 titik.	Pengambilan galian C di hulu sungai, rusaknya kawasan hutan.	Larangan penebangan hutan, pengambilan galian C dan penebangan hutan pada kawasan sumber air	Pemulihan kawasan sumber air dengan tanaman / pohon. Reboisasi kawasan hutan dan penanaman pada lahan – lahan milik rakyat. Pelarangan pengambilan galian c di kawasan sumber air.
2.	Pencemaran air dan tanah.	Kondisi air sungai pada daerah perkotaan dan pedesaan tercemar.	Pembuangan limbah domestik dan perusahaan tahu/tempe dan batik.	Larangan membuang sampah dan limbah ke tanah dan badan sungai.	Pembuatan IPAL tahu/tempe dan batik di perusahaan tahu/tempe dan batik. Membuat TPS di kawasan pinggir sungai.
3.	Kerusakan lahan.	Data tahun 2008 terdapat 300 pengusaha tambang galian C. Pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan.	Penambangan galian C dengan tidak mengindahkan tehnik dan kaedah lingkungan. Penebangan hutan yang secara serampangan.	Larangan penambangan pasir di daerah pantai dan batu bata di daerah hulu utamanya yang tidak berijin. Pendataan dan penertiban penambangan liar galian C. Pendataan hutan yang rusak sekaligus penanaman tanaman tahunan.	Pemanfaatan bekas galian sebagai daerah resapan air (embung). Reklamasi bekas galian untuk daerah pertanian. Penertiban dan tindakan hukum terhadap penambangan liar. Perbaikan konservasi tanah dengan pembuatan teras – teras dan tanaman penguat teras. Pembuatan persemaian di sekitar lahan hutan yang rusak.
4.	Banjir di perkotaan.	Data tahun 2007/2008 terjadi dua kali banjir di perkotaan.	Pembuangan sampah di badan sungai. Penyempitan aliran sungai. Banyaknya bangunan di badan sungai.	Larangan membuang sampah di badan sungai. Normalisasi lebar sungai. Penertiban bangunan di badan sungai.	Perlunya prokasih (program Kali Bersih). Pekerjaan pembersihan sungai secara rutin. Pembongkaran penertiban bangunan di badan sungai. Pembuatan saluran pengentas air hujan terutama di lingkungan padat penduduk.

5.	Kerusakan ekosistem pesisir.	Data tahun 2007 terdapat kerusakan hutan mangrove sebesar 45 % dari luasan hutan mangrove.	Penambangan pasir secara liar. Penebangan secara liar hutan mangrove dan turunnya hasil tangkapan ikan. Pengrusakan terumbu karang, abrasi laut dan penambangan pasir secara liar.	Pembuatan papan informasi (larangan). Pemulihan daerah pesisir dengan tanaman mangrove. Pembuatan terumbu karang buatan. Pemulihan dengan tanaman mangrove. Pemulihan daerah pesisir dengan tanaman mangrove, rehabilitasi dan konservasi terumbu karang, pembangunan talut, pembangunan penahan ombak.	Tindakan tegas dan larangan penebangan liar di daerah pesisir. Rehabilitasi dan konservasi terumbu karang di Kab. Pamekasan. Sosialisasi pentingnya ekosistem yang berwawasan lingkungan. Penanaman kembali tanaman mangrove. Penertiban terhadap penambang liar atau memasang papan larangan.
----	------------------------------	--	--	---	--

2.1. Keterkaitannya Dengan Isu Lain

Kejadian terbentuk tidak serta merta kecuali bencana dan kejadian tidak berdiri sendiri tetapi terjadi karena adanya interaksi antar aspek. Isu lingkungan yang terjadi di kabupaten Pamekasan secara hierarki tidak dapat dilepaskan dari arah, strategi, program dan pelaksanaan pembangunan.

Mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, isu-isu strategis yang ada yaitu :

- a) Percepatan Proses Pemulihan Ekonomi Daerah
- b) Perwujudan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang baik
- c) Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial
- d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan

Berkaitan dengan strategi percepatan proses pemulihan daerah, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam perlu diupayakan secara optimal dengan memperhatikan potensi lokal dan masyarakat setempat, untuk itu perlu

peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumberdaya alam, peningkatan pengawasan dan penyempurnaan peraturan-peraturan daerah dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam. Sementara pada prioritas kesatuan bangsa dan kesejahteraan sosial, pembangunan lingkungan hidup tersirat dalam isu strategis

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu upaya perwujudan pembangunan, misalnya : pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembangunan sarana sosial lainnya. Dengan isu strategi yang ada menunjukkan bahwa kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumberdaya alam yang berupa wilayah (tanah-lahan), air (curah hujan, waduk, mata air), udara, pantai dan pesisir, hasil tambang (bahan galian, mineral, emas) dan flora serta fauna yang hidup di dalamnya sangat besar. Tetapi kekayaan alam ini diperlukan pengelolaan yang bijaksana melalui pengawasan dan perundangan agar senantiasa memberikan pendapatan (ekonomi) dan kesejahteraan penduduknya. Manakala sumberdaya alam dan lingkungan tidak dimanfaatkan secara bijaksana maka ujungnya penderitaan yang akan ditanggung manusia itu sendiri. Beberapa isu lingkungan hidup di kabupaten Pamekasan yang menggejala antara lain:

1. Berkurangnya lahan pertanian

Pembangunan analog dengan pengadaan sarana fisik pada wilayah strategis, konsekuensi pemenuhan lahan untuk maksud tersebut pada gilirannya terjadi pengurangan lahan. Kenyataan ini akan ironis apabila dilakukan pada wilayah potensial.

2. Degradasi lahan

Degradasi lahan diartikan penurunan luas dan kualitas lahan akibat aktivitas melebihi keperuntukannya. Pemulihan ekonomi masyarakat dan tekanan penduduk umumnya menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam seperti penanaman terus menerus dengan tanaman yang memerlukan konsumsi air banyak, penggunaan sarana produksi yang tinggi, penggunaan senyawa kimia

diluar rekomendasi, tidak adanya batasan akan kebutuhan hidup yang dipicu kemudahan perolehan fasilitas, gaya hidup modern. Efek dari semua ini adalah perambahan hutan, penambangan pada hulu sungai, pengeboran air tanah, pembuangan limbah ke sungai, penurunan kualitas tanah.

3. Pencemaran lingkungan

Aktivitas pembangunan dan manusia menghasilkan bahan sisa. Manakala sisaan ini belum diketahui manfaatnya atau belum diketahui pengolahannya untuk mencapai keadaan netral maka akan bersifat limbah. Sampah industri dan permukiman misalnya dapat bersifat limbah apabila belum dapat di reproduksi, reduce, recycling sehingga menimbulkan gas atau leachate. Limbah pengolahan industri, aktivitas MCK yang dilakukan masyarakat di kali menurunkan kualitas air apalagi jika air digunakan untuk irigasi. Peningkatan populasi industri dan kendaraan bermotor dengan BBM dihasilkan emisi gas, apabila mendekati ambang batas toleransi dapat berfungsi sebagai sumber polusi udara.

4. Percepatan penurunan bahan tambang

Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pengusaha dengan bekal orientasi ekonomi, pendidikan rendah, kepemilikan lahan sempit, kesulitan memperoleh pekerjaan sampingan, jumlah keluarga banyak, kemudahan akses informasi (provokasi) dan terbatasnya teknologi maka sifat penambangan akan berubah kearah eksploitasi. Sebagaimana diketahui bahwa bahan tambang termasuk energi yang tak terbarukan. Sifat ini tidak akan berubah ke arah eksploitasi apabila dilakukan introduksi teknologi pengolahan yang dapat merubah nilai bahan tambang dari bahan dasar menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi. Pemetaan, pengawasan dan pembinaan terus menerus menjadi salah satu kendali penurunan bahan tambang. Dalam perjalanan waktu isu yang ada dapat berubah menjadi masalah utama, pada gilirannya dapat memunculkan isu baru sehingga berakibat meluasnya permasalahan yang ada apabila tidak segera ditangani. Penanganan tidak dilaksanakan satu arah tetapi dimensional sebab

adanya jalinan sebab akibat dan interaksi antar komponen.

Sedangkan yang dapat kita rangkum permasalahan isue utama lingkungan pada tahun 2008 pada Kabupaten Pamekasan adalah :

1. Banjir perkotaan pada saat musim penghujan
2. Pencemaran Limbah Industri rumah tangga misalnya perusahaan Tahu/tempe, limbah batik dll
3. Kerusakan lingkungan akibat penambangan galian C
4. Kerusakan lingkungan daerah pesisir /pantai
5. Berkurangnya lahan hutan yang berubah menjadi daerah penambangan galian c/ batu bata
6. Makin banyaknya kasus mengecilnya debit mata air serta matinya sumber –sumber air dalam tanah

Hal tersebut perlu diwaspadai yang dampaknya sangat dirasakan untuk masa - masa yang akan datang .



BAB .III

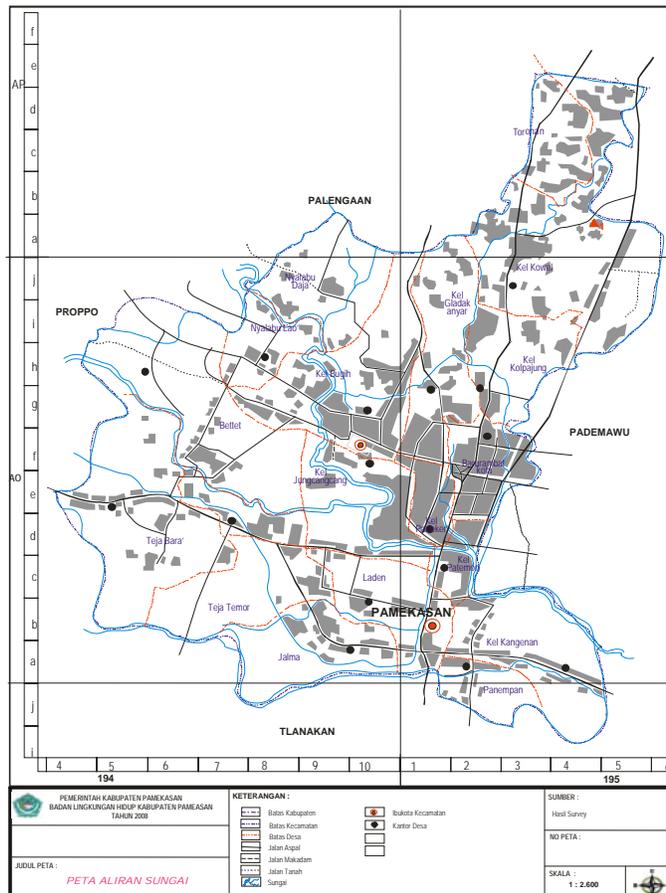
AIR



III. AIR

3.1 Sumber Daya Air

Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 1 Sub Das yaitu Das Kali Semajid terdiri Kali Kloang - Semajid, Kali Lembung Bunter – Kali Sumber Pajung, Kali Sumber Pajung - Kali Semajid, Kali Jombang – Kali Semajid, Kali Tambak Ponteh, Kali Pendi, Kali Eggran, Kali Belinjang, Kali Lesong, Kali Tamberu dan Kali Angsoka. Dengan 2 Sungai yang sangat berpengaruh terhadap kota Pamekasan adalah Kali Kloang dan Kali Jombang yang sering menimbulkan banjir pada musim penghujan. Banyaknya sub DAS mengindikasikan fisiografi berbukit sampai bergelombang dan curah hujan yang tinggi. Meskipun demikian rata - rata curah hujan tahunan pada stasiun pengamatan hujan yang tersebar di wilayah kabupaten Pamekasan menunjukkan kenaikan jumlah curah untuk tahun 2007 terutama untuk Bulan Maret s/d Mei 2007.



**Peta Aliran Sungai
Kabupaten Pamekasan**

3.2 Kualitas Air

Untuk mengurangi kecepatan aliran sungai dan memanfaatkan potensi yang ada maka di beberapa tempat pada masing - masing kali dibangun / direhabitasi saluran / bangunan bendungan di daerah Klampar Kecamatan Proppo, Saluran Sumber Nyamplong Desa Kowel Pamekasan atau ditempat – tempat lain. Salah satu manfaat keberadaan bendungan adalah untuk irigasi. Selain untuk irigasi, keberadaan kali yang ada dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat sekitarnya seperti mandi, cuci dan kakus (MCK) dan di hilir direncanakan akan dibangun waduk Samiran di Kecamatan Proppo.

Multifungsi sungai / kali di wilayah kabupaten Pamekasan akan terancam apabila aktivitas manusia di sekitarnya tidak memahaminya. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pamekasan keberadaan Perusahaan – Perusahaan Tahu / Tempe yang berlokasi disekitar sungai di Kota Pamekasan berjumlah 19 perusahaan bergerak di bidang pengolahan bahan makanan telah mengakibatkan pencemaran di beberapa sungai di Pamekasan sesuai hasil pengujian yang dilakukan melalui Laboratorium BTKL Surabaya didapat beberapa penurunan parameter BOD rata – rata 3,27 dari angka pengujian BOD Badan air sungai di Hulu dan Badan Sungai di Hilir , sedangkan diukur dengan ambang batas pengujian berdasarkan kriteria mutu air berdasar PP. No. 82 Th. 2001 sudah melebihi ambang batas yaitu angka 3 dengan tingkat penurunan tertinggi untuk daerah aliran sungai Kloang sebesar 6,20 mg/l . Sedangkan diukur dengan parameter pengujian COD sesuai dengan PP tersebut diatas didapat hasil dimana COD masing – masing sungai , diatas Kreteria mutu air yang dipersyaratkan sebesar 25 mg/l dengan hasil rata – rata penurunan mutu air Hulu dan hilir sebesar 6,789 mg/l dengan tingkat penurunan tertinggi pada sungai Kloang sebesar 11, 9018 mg/l.

Tabel hasil Pengujian BOD Badan Sungai

No	Nama Sungai	Hasil Pengujian Nilai BOD			Kriteria Mutu Air *)PP No.82 Th.2001 Klas III
		Hulu	Hilir	Penurunan	
1.	Sungai K.Kloang	9,31	3,11	6,20	3
2.	K. Sbr. Pajung	6,11	5,21	0,90	3
3	K. Jombang	7,51	4,41	3,10	3
4.	K. Semajid	8,61	5,71	2,90	3
	Rata –rata			3,27	

Tabel hasil Pengujian COD Badan Sungai

No	Nama Sungai	Hasil Pengujian Nilai BOD			Kriteria Mutu Air *)PP No.82 Th.2001 Klas III
		Hulu	Hilir	Penurunan	
1.	Sungai K.Kloang	19,453	7,5412	11,9018	25
2.	K. Sbr. Pajung	13,566	10,817	2,749	25
3	K. Jombang	15,564	9,0325	6,5315	25
4.	K. Semajid	17,214	11,239	5,975	25
	Rata –rata			6,7893	

Juga perusahaan pengolahan bahan bekas di Desa Sumedangan yang membuang limbahnya ke sungai lebih memperparah kondisi air di Sungai Kali Semajid yang memungkinkan akan mengakibatkan pencemaran air di Daerah hulu sungai di Desa Mangunan dan Desa Padelegan Kecamatan Pademawu yang disinyalir berakibat turunnya produksi ikan teri di Daerah Pademawu terutama di Daerah Tanjung dan sekitarnya. Penurunan debit aliran dan kualitas air sungai diduga menjadi penyebab turunnya jumlah pendapatan nelayan juga ini terjadi diakibatkan turunnya debit sumber di hulu sungai umpama di Daerah Sumber Nyamplong dan Sumber Pajung di Desa Rekkerrek Kecamatan Proppo

tahun 2006. Penurunan ini terjadi di kecamatan Pamekasan dan Proppo (Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan , 2008).

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah memperingatkan beberapa perusahaan Tahu/tempe dan perusahaan pengolahan bahan bekas yang diduga melakukan pencemaran agar tidak membuang limbah ke Sungai Kali Semajid dan anak sungainya yang mengalir ke Hilir sungai Daerah Pesisir di Padelegan Kecamatan Pademawu. Berdasarkan hasil penelitian instansi terkait, pencemaran di Hilir Sungai di Desa Padelegan selain disebabkan karena blooming algae, juga karena limbah industri. Berdasarkan data yang diambil dan diuji pada Laboratorium Th. 2006 dan Tahun 2007, pencemaran di Sungai Kali Semajid terjadi setiap tahun. Pencemaran ini mengakibatkan kelangkaan ikan dan ekosistem di Daerah Pesisir Pantai Selatan Utamanya Daerah Pegagan, Desa Majungan, Desa Padelegan dan dan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu. Penyebab pencemaran karena tingginya kadar nitrogen dan phospor, juga karena pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan juga limbah sampah domestik lainnya yang berada di sepanjang hulu Sungai Kali Semajid dan anak sungainya seperti Kali Sumber Pajung dan Kali Kloang. Untuk mengatasi tingginya kandungan nitrogen dan phospor, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan akan membangun IPAL perusahaan tahu / tempe serta meletakkan container - container sampah pada daerah dekat sungai untuk mengurangi limbah rumah tangga di beberapa tempat.

Kali Semajid dengan aliran anak sungai Kali Kloang dan Kali Sumber Pajung yang diakibatkan Kerusakan hutan di wilayah dengan menurunkan debit kali akibat tidak adanya tumbuhan yang berfungsi menyimpan air ke dalam tanah. Sebagaimana yang terjadi di Rekkkerrek Kecamatan Proppo dan daerah Desa Toronan sekitarnya, penurunan debit berakibat penurunan luas baku sawah. Penurunan ini diperparah dengan isu pemanfaatan sumberdaya air untuk air minum PDAM yang mengadakan pengeboran di Daerah Sumber Nyamplong dengan tidak melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan sumber air tanpa melalui mekanisme pengelolaan yang ada dan pengambilan pasir liar di daerah

kawasan sumber memperparah kondisi daerah kawasan sumber. Kasus ini dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar yang akan mengakibatkan mengecilnya debit mata air atau matinya beberapa sumber di Kabupaten Pamekasan. Mengingat betapa strategisnya sumberdaya air maka sistem pengelolaan yang menyangkut kelembagaan, kontribusi dan distribusi, stabilitas debit dan mutu yang baik serta konservasi sumber menjadi masalah yang mendesak. Tanpa penanganan segera, lambat atau cepat kasus yang dikemukakan akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Untuk hal tersebut dalam mencegah dini kasus pencemaran air di badan sungai telah dibangun pembangunan Laboratorium Lingkungan.



BAB .IV

UDARA



IV. UDARA

Bagi manusia O_2 merupakan gas yang berfungsi menjamin berlangsungnya kehidupan, pada saat yang sama manusia melepas CO_2 hasil pernafasan. Selain hasil pernafasan, aktivitas manusia (industri, transportasi dan pertanian) menghasilkan karbon dan metan. Bagi tumbuhan, CO_2 merupakan gas yang dapat diolah menjadi senyawa organik berguna. Berdasarkan hal ini maka alam sebenarnya telah menjamin sistem yang setimbang. Masalahnya adalah dapatkah aktivitas manusia itu tidak melebihi kemampuan tumbuhan dalam menyerap CO_2 atau seberapa banyak tanaman diusahakan manusia untuk mengurangi aktivitasnya apabila tidak terjadi kesetimbangan maka berdampak terhadap penurunan konsentrasi O_2 . Peningkatan CO_2 pada gilirannya dapat meningkatkan suhu udara, terbentuknya polutan dan timbulnya gas beracun. Suhu udara dan intensitas penyinaran matahari terjadi kecenderungan peningkatan, mengindikasikan peningkatan konsentrasi CO_2 di udara dan ada gejala pencemaran udara. Apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah industri dan alat transportasi yang dimiliki masyarakat kabupaten Pamekasan maka dapat disinyalir bahwa sumber pencemar adalah sisa-sisa pembakaran BBM. Sementara di Kabupaten Pamekasan dengan tidak adanya industri besar yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran udara serta masih terdapatnya luasan hutan dan tanaman penghijauan yang memadai, maka dampak pencemaran udara masih belum dirasakan jadi belum merupakan isu lingkungan yang mendapat perhatian khusus namun perlu mendapat perhatian untuk masa yang akan datang khususnya pasca pembangunan Jembatan Suramadu .



BAB . V

LAHAN DAN

HUTAN



V. LAHAN DAN HUTAN

5.1 Lahan Terbuka Hijau

Perkembangan pembangunan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan dan tersedianya sarana fisik, pada gilirannya mengurangi penggunaan tanah bagi kepentingan lain. Persentase perluasan kawasan pemukiman selama 5 tahun terakhir menunjukkan penambahan yang signifikan. Efek perluasan kawasan terjadi penurunan luas lahan hijau terbuka akibat kepentingan pembangunan. Luas lahan terbuka hijau sebanyak 325.509 ha pada tahun 2003 menjadi 323.826 pada tahun 2006, berarti terjadi alih fungsi seluas 1.683 ha pada kurun waktu 2 tahun. Penyusutan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 – 2004.



(*Taman Kota Arek Lancor*)



(Hutan Kota Tirta Basuki)

Dari komponen sumberdaya, peningkatan kawasan pemukiman dan penurunan luas lahan menurunkan sumberdaya alam lainnya seperti lahan sawah, jaringan irigasi, ruang bagi populasi flora dan fauna, permukaan hijau dalam penyerapan radiasi panas. Akibat penurunan dan peningkatan permukaan media serapan dan pantulan cahaya matahari menimbulkan efek terhadap ketidak-stabilan ekosistem seperti peningkatan suhu, pencemaran air irigasi, penurunan populasi satwa dan penurunan produksi pertanian. Disisi lain peningkatan kawasan menuntut tersedianya sarana pelengkap seperti kayu, pohon tebang, air minum, energi listrik sehingga meningkatkan jumlah persediaan. Perluasan kawasan pemukiman terjadi pada wilayah perkotaan untuk kepentingan sarana pemerintahan, pengembangan industri, real estate, maupun wilayah pedesaan yang pada umumnya berada di lahan pertanian dan atau kawasan penyangga. Pengaturan tata ruang dalam kurun waktu pendek, menengah sampai panjang mutlak diperlukan. Pendekatan sustainable ecosystem of development menjamin kesetimbangan dalam jangka panjang.

5.2 Lahan kritis

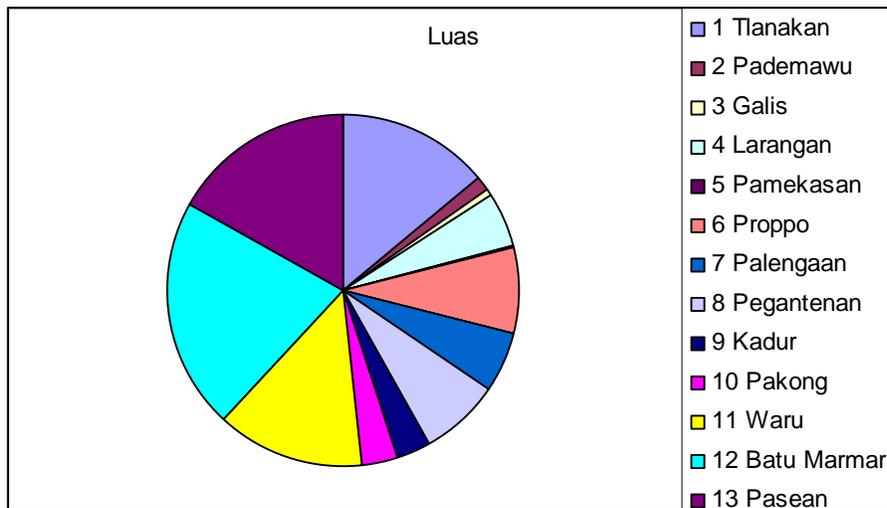
Sekitar 47.179 ha lahan kritis di Kabupaten Pamekasan, dinyatakan dalam kondisi yang mengawatirkan yang tersebar di 13 Kecamatan sebagian besar pada daerah hulu DAS terletak di kawasan hutan lindung, di luar hutan dan di kawasan budidaya pertanian. Kecamatan yang paling terancam dengan kondisi itu antara lain Pegantenan, Palenga'an dan Pakong.

Selain itu jalan poros sepanjang Pamekasan yang melewati Pakong, Waru dan Kecamatan Pegantenan yang harus ditangani serius agar tidak mengakibatkan bencana. Peningkatan lahan kritis kategori potensial sampai kritis setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan terjadinya eksploitasi terhadap produktivitas tanpa mengindahkan kaidah konservasi. Secara langsung, peningkatan luas lahan kritis menurunkan sumberdaya alam, secara tidak langsung membawa efek terhadap sumberdaya lainnya. Apabila eksploitasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi maka tidak mustahil terjadi perambahan terhadap sumberdaya alam yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sumberdaya dimaksud adalah hutan, sungai dan "kawasan sosial" serta pencurian.

LUAS LAHAN KRITIS

Kabupaten / Kota : Pamekasan
Tahun Data : 2007 - 2008

No.	Lokasi		Luas (ha)	
	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Tlanakan	Tlanakan	6.703	6.703
2	Pademawu	Pademawu	652	652
3	Galis	Galis	284	284
4	Larangan	Larangan	2.379	2.379
5	Pamekasan	Pamekasan	108	108
6	Proppo	Proppo	3.748	3.748
7	Palengaan	Palengaan	2.702	2.702
8	Pegantenan	Pegantenan	3.569	3.569
9	Kadur	Kadur	1.572	1.572
10	Pakong	Pakong	1.574	1.574
11	Waru	Waru	6.555	6.555
12	Batumarmar	Batumarmar	10.222	10.222
13	Pasean	Pasean	8.111	8.111
JUMLAH			47.179	47.179



(Grafik Luas Lahan Kritis Tahun 2006 – 2007)



BAB . VI

PESISIR DAN

LAUT



VI. PESISIR DAN LAUT

6.1 Pesisir dan Pantai

Wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki 6 Kecamatan Pantai, yaitu Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Batumarmar dan Pasean yang mempunyai arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya. Dengan panjang garis pantai Kabupaten Pamekasan 52 km terdiri panjang pantai Utara 18 Km dan Pantai Selatan 34 km dengan luas pantai 9.630 Ha, seharusnya masyarakat pesisir Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi di atas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini, sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian masyarakat tertinggal dibanding kelompok masyarakat lain. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka masih tergolong rendah.

Wilayah pesisir Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat wisata bahari (marine tourism) yang dipadukan dengan industri perikanan. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir telah disusun dan disosialisasikan buku rencana strategis wilayah pesisir dan rencana zonasi wilayah pesisir yang selanjutnya akan disusun rencana pengelolaannya. Rencana tata ruang membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk peraturan perundangan (Perda), rencana tindak pembangunan (action plan) dan rencana program yang akan dilaksanakan. Laut merupakan lumbung bagi berbagai jenis ikan. Perkembangan ikan sangat tergantung pada tempat berkembang biak. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makan, daerah asuhan bagi biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah. Terumbu karang juga merupakan sumber makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Selain itu terumbu karang juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi.

Semakin bertambahnya nilai ekonomis maupun kebutuhan masyarakat akan sumberdaya yang ada di terumbu karang seperti ikan, udang lobster, tripang dan lain-lain, maka aktivitas yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi tersebut semakin besar pula. Dengan demikian tekanan ekologis terhadap ekosistem terumbu karang juga akan semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem terumbu karang dan biota yang hidup di dalamnya. Sehingga sudah waktunya bangsa Indonesia mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna mengurangi laju degradasi terumbu karang akibat dieksploitasi oleh manusia. Hasil studi kondisi ekosistem terumbu karang di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

Penyebab kerusakan pesisir dan pantai diakibatkan karena pengambilan batu karang untuk bahan bangunan oleh masyarakat pesisir terutama di daerah Pantai Selatan nampak di Desa Ambat, Tlesah dan Baddurih Kecamatan Tlanakan. Sedangkan usaha pemulihan kerusakan pesisir dan pantai di Kabupaten Pamekasan sedang dibangun terumbu karang buatan.



BAB . VII

REKOMENDASI /

TINDAK LANJUT



VII. REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Wilayah kabupaten Paamekasan mencakup 792,3 km², secara administratif terdiri 13 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Pamekasan. Visi dan misi pembangunan di kabupaten Pamekasan diarahkan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Walaupun berbagai program / kegiatan telah dilaksanakan tetapi perubahan kualitas lingkungan belum memberikan hasil maksimal. Pernyataan ini didukung kenyataan di lapang adanya isu-isu lingkungan yang masih teridentifikasi.

Permasalahan lingkungan dan identifikasi penyebab yang saling berinteraksi dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Kualitas lingkungan

Hasil pemantauan kualitas lingkungan memperlihatkan kecenderungan penurunan debit air, pencemaran air kali dan air tanah, degradasi lahan, alih fungsi lahan. Penggunaan air permukaan dan air tanah di beberapa lokasi pemantauan belum memenuhi baku mutu yang sesuai bagi peruntukannya. Penambahan golongan C yang berlebihan dan perambahan wilayah tertutup memungkinkan terjadinya degradasi lahan.

2. Ekonomi dan sosial

Tuntutan kebutuhan yang berlebihan dan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan mendorong peningkatan penerimaan. Lemahnya supremasi hukum dan pengawasan mendorong perambahan dalam wilayah tertutup / tertentu. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan masih menjadi soko guru perekonomian.

3. Kependudukan, ketenagakerjaan dan pendidikan

Peningkatan penduduk, pemerataan wilayah sebaran menjadi gap. Terbatasnya daya tampung industri terhadap angkatan kerja dan lemahnya pendidikan / ketrampilan masyarakat serta pemahaman terhadap idang lingkungan berperan dalam penurunan kualitas lingkungan.

Untuk mengantisipasi, memulihkan, memelihara dan meningkatkan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan direkomendasikan :

1. Pemulihan kawasan sumber air dengan tanaman / pohon.
2. Reboisasi kawasan hutan dan penanaman pada lahan – lahan milik rakyat.
3. Pelarangan pengambilan Galian C di kawasan sumber air.
4. Pembuatan IPAL tahu / tempe di perusahaan tahu / tempe dan batik.
5. Membuat TPS di kawasan pinggir sungai.
6. Pemanfaatan bekas galian sebagai daerah resapan air (embung).
7. Reklamasi bekas galian untuk daerah pertanian.
8. Penertiban dan tindakan hukum terhadap penambangan liar.
9. Perbaikan konservasi tanah dengan pembuatan teras – teras dan tanaman penguat teras.
10. Pembuatan persemaian di sekitar lahan hutan dan badan sungai.
11. Perlunya prokasih (program Kali Bersih).
12. Pekerjaan pembersihan sungai secara rutin.
13. Pembongkaran penertiban bangunan di badan sungai.
14. Pembuatan saluran pengentas air hujan terutama di lingkungan padat penduduk.
15. Tindakan tegas dan larangan penebangan liar di daerah pesisir.
16. Rehabilitasi dan konservasi terumbu karang di Kab. Pamekasan.
17. Sosialisasi pentingnya ekosistem yang berwawasan lingkungan.
18. Penanaman kembali tanaman mangrove.
19. Penertiban terhadap penambang liar atau memasang papan larangan.

Daftar Pustaka - Sumber data
 - Referensi pustaka

LAMPIRAN

A Kumpulan Data SLHD